

## BAB I

### Pendahuluan

#### 1.1. Latar Belakang

Kapitalisme pada dasarnya merupakan sistem perekonomian yang menekankan kepada peran modal dengan segala jenisnya, termasuk barang-barang yang digunakan dalam aktivitas untuk menghasilkan barang lainnya.<sup>1</sup> Ebenstein menyebut kapitalisme sebagai sistem sosial yang menyeluruh dan lebih luas dari sekedar sistem perekonomian. Kapitalisme bergerak sesuai dengan perkembangan nilai-nilai individualisme.<sup>2</sup>

Secara lebih spesifik, kapitalisme adalah sebuah sistem yang diciptakan untuk mengembangkan ekspansi komersial melewati batas-batas lokal menuju ke skala internasional. Pengusaha kapitalis mempelajari pola-pola perdagangan internasional dengan tujuan untuk mengakumulasi modal demi keuntungan sebesar-besarnya. Ebenstein menambahkan sistem kapitalisme mulai berkembang di Inggris pada abad 18 M dan kemudian menyebar luas ke kawasan Eropa Barat Laut dan Amerika Utara.<sup>3</sup>

Risalah terkenal Adam Smith, yaitu *The Wealth of Nations*, diakui sebagai karya penggagas awal perkembangan kapitalisme.<sup>4</sup> Smith berpendapat bahwa jalan yang terbaik untuk memperoleh kemakmuran adalah dengan membiarkan individu-individu mengejar kepentingan mereka sendiri tanpa keterlibatan perusahaan-perusahaan negara. Ayn Rand

---

<sup>1</sup> Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: Gramedia, 1996), 67.

<sup>2</sup> Nur Sayyid Santoso Kristeva, *Sejarah Ideologi Dunia* (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015), 13.

<sup>3</sup> Ibid, 14.

<sup>4</sup> Ibid, 15.

dalam *Capitalism* menyebutkan tiga pokok pikiran dari kapitalisme, yaitu kebebasan individu, kepentingan diri dan pasar bebas. Menurut Rand, kebebasan individu merupakan asumsi dasar kapitalisme karena dengan pengakuan hak alami tersebut, individu bebas berfikir, berkarya dan memproduksi untuk kelangsungan hidupnya. Rand menambahkan bahwa manusia hidup adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain.<sup>5</sup>

Robert Cox sebagai salah satu pentiori dalam hubungan internasional dan dikategorikan kepada aliran teori kritis, memberikan beberapa analisis teoritis menyangkut keberlangsungan sistem kapitalisme di dunia. Cox menerapkan konsep hegemoni yang digagas oleh Antonio Gramsci ke dalam lingkup internasional dengan berargumen bahwa hegemoni adalah sesuatu yang penting keberadaannya dalam konteks mempertahankan stabilitas suatu sistem dalam ruang lingkup domestik.<sup>6</sup>

Dalam beberapa tulisannya, Cox memberikan pandangan terhadap fluktuasi tatanan hegemoni dunia. Cox membedakan tiga periode struktur yang menghegemoni secara berurutan yaitu : ekonomi internasional liberal (1789-1873), era imperialisme tandingan (1873-1945) dan tatanan dunia yang neoliberal (setelah 1945).<sup>7</sup> Di sisi lain, Cox menambahkan Amerika Serikat yang notabene adalah negara kapitalis besar muncul sebagai negara yang menghegemoni sistem ekonomi politik serta tatanan dunia setelah Perang Dunia II dengan rentang waktu dari 1945 hingga 1965.<sup>8</sup> Beberapa asumsi Cox tersebut membuktikan bahwa pada periode-periode tersebut, dunia dihegemoni oleh sistem yang cenderung kapitalistik.

---

<sup>5</sup> Ibid, 16.

<sup>6</sup> Ranny Emilia, *Teori-teori Hubungan Internasional* (Padang: Universitas Andalas), 92.

<sup>7</sup> Martin Griffiths, *Fifty Key Thinkers in International Relations*, ed. Mahyudin dan Izamuddin Makmur (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 160.

<sup>8</sup> Stephen Gill, *Gramsci, Historical Materialism and International Relations* (New York: Cambridge University Press, 1993), 60.

Dalam mempertahankan hegemoninya di pola hubungan internasional, Amerika Serikat membuat badan-badan khusus dengan tujuan tertentu. Amerika Serikat mendirikan *National Security Council* (NSC) pada 26 Juli 1947 yang berfungsi sebagai badan pertimbangan presiden mengenai integritas dalam negeri, hubungan luar negeri serta kegiatan militer yang menyangkut keamanan nasional.<sup>9</sup> Di sisi lain, Amerika Serikat juga membentuk *Central Intelligence Agency* (CIA) sebagai badan intelijen yang bersifat rahasia.<sup>10</sup> CIA sering melakukan serangkaian agenda subversi terhadap negara-negara yang kurang bersahabat dengan AS. Beberapa kasusnya antara lain, campur tangannya dalam pemilihan umum Italia tahun 1948, keikutsertaannya dalam penggulingan pemerintahan Mossadegh tahun 1953 di Iran dan yang menjadi otak dalam turunya pemerintahan Jacobo Arbenz tahun 1954 di Guatemala.<sup>11</sup> Selain itu, Amerika Serikat juga mendirikan *Research and Development Corporation* (RAND Corporation), suatu badan yang bertindak sebagai juru pikir, gudang tenaga ahli dan sarjana-sarjana terkemuka. RAND Corporation berisi akademisi-akademisi yang bertujuan untuk memperkokoh hegemoni kapitalisme dalam tatanan dunia internasional.<sup>12</sup> Amerika Serikat juga mendirikan *Ford Foundation*, sebagai lembaga swasta yang berfungsi untuk menghimpun dana untuk pelaksanaan program-program tertentu.<sup>13</sup>

Sistem kapitalisme yang menghegemoni tatanan dunia secara langsung juga terjadi di Indonesia. Jika dirunut secara historis, kolonial Belanda sangat berpengaruh dalam berkembangnya era kapitalisme selama masa penjajahan.<sup>14</sup> Kegiatan Belanda dalam

---

<sup>9</sup> Suar Suroso, *Akar dan Dalang* (Bandung: Ultimus, 2013), 62.

<sup>10</sup> Ibid, 67.

<sup>11</sup> Ibid, 69 dan 70.

<sup>12</sup> Ibid, 75.

<sup>13</sup> Ibid, 76.

<sup>14</sup> Yanuar Ikbar, *Ekonomi Politik Internasional: Konsep dan Teori* (Bandung: PT. Refika Aditama, 109).

konteks eksploitasi ekonomi di kawasan Indonesia dimulai akhir abad ke-17 dengan maskapai dagang *Verenigde Oostindische Compagnie* (VOC). Memasuki abad ke-19, eksploitasi dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda sampai berlakunya Undang-Undang Agraria tahun 1870. Dengan pemberlakuan undang-undang tersebut, kegiatan eksploitasi lebih didominasi oleh pihak swasta daripada pemerintah kolonial. Sejarah mencatat, dari abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, sektor perekonomian dikuasai oleh pihak Eropa khususnya modal Belanda.<sup>15</sup>

Sebelum tahun 1930-an, modal asing di Indonesia sebagian besar bergerak di bidang perkebunan dan pertambangan. Pada tahun 1930-an, investasi asing semakin deras masuk ke Indonesia, merambah ke bidang lainnya. Pada periode tersebut, modal asing masuk lewat perusahaan-perusahaan seperti *Unilever* yang membuka pabrik sabun dan margarin, *Goodyear* yang berjalan di bidang produksi ban, juga *Lindeteves* sebuah perusahaan besar Belanda yang bergerak untuk memproduksi cat.<sup>16</sup> Periode tahun 1922 - 1940, penanaman modal asing di kawasan Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 1.1. Nilai Penanaman Modal Asing dari Tahun 1922 - 1940**

(dalam jutaan *gulden*)

Negara Asal	Industri Gula		Perkebunan		Industri Lain		Jumlah	
	1922	1940	1922	1940	1922	1940	1922	1940
Belanda	322	420	545	1.047	1.290	1.160	2.159	2.634
Inggris	-	-	245	200	55	260	300	460
Amerika Serikat	-	-	28	100	7	195	35	295
Lain-lain	3	-	127	150	18	100	148	250
<b>Jumlah</b>	<b>325</b>	<b>420</b>	<b>945</b>	<b>1.497</b>	<b>1.370</b>	<b>1.715</b>	<b>2.642</b>	<b>3.639</b>

<sup>15</sup> Bondan Kanumoyoso, *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), 1.

<sup>16</sup> Ibid, 18.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: Creutzberg, *Changing Economy in Indonesia*, Vol. III, 1977.

Setelah Indonesia merdeka, Indonesia juga tidak serta merta terlepas dari modal asing yang berkeliaran di wilayah domestik negara. Memasuki dekade 1950-an sektor ekonomi Indonesia masih dikuasai perusahaan-perusahaan asing, khususnya Belanda. Terdapat lima perusahaan besar Belanda yang disebut *The Big Five* antara lain; *NV Borsumij* (bir, tekstil dan apotik), *NV Jacobson van den Berg* (distribusi barang ekspor dan impor), *NV Internatio* (perkapalan), *NV Lindeteves* (peralatan teknik untuk keperluan industri) dan *NV Geo Wehry & Co* (perkebunan).<sup>17</sup> Di sisi lain, adanya perundingan-perundingan yang dilakukan dari Linggarjati, Renville hingga Konferensi Meja Bundar secara tidak langsung telah merestorasi keberadaan Belanda di tanah air dalam bentuk neo-kolonialisme.<sup>18</sup> Agenda neo-kolonialisme dapat dikategorikan sebagai perluasan kapitalisme karena dalam kasus ini Belanda dengan segala cara tetap ingin melakukan kegiatan akumulasi kapital di Indonesia.

Amerika Serikat sebagai negara kapitalis besar secara langsung juga menghegemoni tatanan domestik tanah air. Pada tahun 1964, Sejarahwan Henry Benda berpendapat bahwa tidak ada negara lain di Asia Tenggara yang mendapat perhatian, dukungan kelembagaan serta beasiswa individu yang diberikan Amerika Serikat secara intensif, melainkan Indonesia.<sup>19</sup> Sejarah mencatat, Amerika Serikat sebagai negara kapitalis besar menggunakan cara-cara seperti intervensi politik hingga kontrol intelektual dalam memperluas serta mempertahankan hegemoninya.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid, 23 dan 24.

<sup>18</sup> D.N. Aidit, *Kibarkan Tinggi Pandji Revolusi* (Jakarta: Jajasan Pembaruan, 1964), 11.

<sup>19</sup> Bradley R. Simpson, *Economist with Guns*, ed. Johannes Supriyono (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 27.

<sup>20</sup> Ibid, 25.

Pada tahun 1949 hingga 1960, Amerika Serikat telah menyalurkan bantuan ekonomi lebih dari \$470 juta untuk Indonesia berkisar pada bantuan teknis, pelatihan partisipan, pinjaman Bank Ekspor-Import untuk proyek-proyek infrastruktur serta bantuan Pangan untuk Perdamaian (*Food for Peace*). Di satu sisi, Indonesia mengimpor pupuk dan peralatan pertanian dari AS sebagai langkah yang disebut modernisasi pertanian.<sup>21</sup> Di kasus lainnya, sejak tahun 1945 hingga 1964 modal Amerika Serikat juga terdapat di perusahaan minyak bumi multinasional yang ada di Indonesia seperti Shell (\$ 84 juta), Stanvac (\$ 40 juta) dan Caltex (\$ 47 juta).<sup>22</sup> Tampak jelas Indonesia sangat tergantung dengan Amerika Serikat dalam konteks bantuan luar negeri dan investasi asing.

Di sisi lain, dinamika politik tanah air juga sering diintervensi oleh Amerika Serikat salah satunya dalam usaha penggulingan kabinet Amir Syarifudin yang tidak pro-Barat. Hal ini dilakukan AS dengan menggerakkan oposisi Masjumi, berbekal data yang dihimpun oleh CIA.<sup>23</sup> Dalam konteks militer dan pertahanan, antara tahun 1958 dan 1959 bantuan militer AS untuk Indonesia menjadi tiga kali lipat lebih besar, yaitu dari \$ 5,4 juta menjadi \$16,9 juta.<sup>24</sup> Dalam menggulingkan Soekarno yang juga tidak senang dengan hegemoni kapitalis, AS masuk ke Angkatan Darat dengan melatih serta mendidik perwira-perwira yang terhimpun di dalamnya. Sekitar 2000 perwira AD pernah menimba ilmu di Akademi Militer *Western Institute for Security Cooperation* di Fort Benning, Georgia dan *The Commander in Burgency Training Center* di Fort Bragg, Fayetteville.<sup>25</sup>

Tidak hanya sampai di sana. Amerika Serikat juga mengkonstruksi hegemoninya terhadap Indonesia melalui akademisi dan intelektual. Dalam usaha ini, RAND

---

<sup>21</sup> Ibid, 67.

<sup>22</sup> D.N. Aidit, 13.

<sup>23</sup> Suar Suroso, 69.

<sup>24</sup> Bradley R. Simpson, 64.

<sup>25</sup> Suar Suroso, xi.

Corporation dan Ford Foundation bekerja sama guna mencari dan mengidentifikasi individu-individu dari lapisan elite intelektual Indonesia yang memiliki prospek untuk proses rekrutment selanjutnya.<sup>26</sup> Kapitalisme akan lebih kuat kedudukannya apabila digagas oleh intelektual yang memakai pendekatan-pendekatan secara teoritis.

Dari beberapa data dan kasus di atas, tampak esensi kapitalisme mendominasi bahkan menghegemoni setiap aspek yang ada di tanah air. Kapitalisme di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda hingga Amerika Serikat. Di sisi lain, kapitalisme bukannya tanpa perlawanan. Ada serangkaian tindakan terorganisir yang ingin melawan tatanan yang menghegemonik ini. Salah satunya adalah kelompok yang memakai komunisme sebagai ideologinya. Komunisme secara langsung merupakan cara pandang yang memakai prinsip-prinsip marxisme dalam berfikir, melihat, menganalisa dan bertindak. Dalam dinamika hubungan antarnegara, komunisme adalah golongan yang menyatakan diri sebagai antitesis sekaligus sintesis dari kekuatan kapitalisme. Oleh karena itu, komunisme merupakan ideologi yang aktualisasi politiknya bersifat antikapitalis.<sup>27</sup> Kapitalis adalah ideologi yang menghegemoni secara internasional, dan oleh karena itu, perjuangan untuk mencabut akar kapitalisme dan menanam benih-benih komunisme harus terkonsolidasi dengan suatu tindakan terorganisir dan melibatkan solidaritas negara-negara yang terhegemoni.

Komunisme sebagai ideologi antitesis kapitalisme menjadi salah satu ideologi yang tumbuh di Indonesia seiring dengan usaha kemerdekaan.<sup>28</sup> Komunisme berkembang seiring dengan usaha perebutan kemerdekaan Indonesia dan juga memiliki pengaruh yang

---

<sup>26</sup> Ibid, 98.

<sup>27</sup> Imam Yudotomo, *Quo Vadis Golongan Kiri Indonesia* (Yogyakarta: Center for Social-Democratic Studies, 2004), 6.

<sup>28</sup> Imam Yudotomo, 7.

signifikan setelah Indonesia merdeka. Dalam konteks ini, ideologi komunisme tertampung di dalam organisasi kepartaian bernama Partai Komunis Indonesia (PKI).

Paham komunisme awal mulanya diperkenalkan oleh Sneevliet, seorang komunis Belanda pada tahun 1913. Tahun 1914, Sneevliet menggagas terbentuknya *Indische Social-Democratische Vereeniging* (ISDV) sebagai suatu perhimpunan yang mencita-citakan tatanan yang sosialis.<sup>29</sup> Dalam penggagasan ISDV terdapat beberapa tujuan penting di antaranya memperjuangkan kemerdekaan atas kapitalisme, mengorganisir kaum tani dan buruh untuk melawan penindasan, mendidik rakyat dengan pengetahuan sosialisme dan menyebarkan buku-buku sosialisme. Pada bulan Mei 1920, ISDV melangsungkan kongres tahunan di Semarang yang di dalamnya terdapat kebijakan untuk mengubah nama ISDV menjadi *Persarekatan Komunis India* (PKI). Setelah itu, Persarekatan Komunis India kembali berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia, lewat referendum yang dilakukan bulan November 1920.<sup>30</sup> PKI di masa-masa selanjutnya memainkan peran penting dalam usaha perebutan kemerdekaan serta mempertahankannya pascarevolusi 1945.

Pada Kongres ke VI yang dilangsungkan tanggal 11-13 Januari 1947, PKI dengan tegas mencantumkan tujuan partai yang tertuang dalam Anggaran Dasar yaitu untuk membentuk masyarakat sosialistik di Indonesia. PKI berusaha mencapai tujuannya dengan jalan perjuangan kelas yang revolusioner, yaitu kaum buruh, tani dan golongan-golongan yang merasa terhisap oleh kelas borjuis.<sup>31</sup> Dalam hal pembangunan ekonomi di Indonesia, PKI dengan tegas menentang keberadaan pihak asing yang notabene melakukan eksploitasi

---

<sup>29</sup> Suar Suroso, 149.

<sup>30</sup> Suradi SS, *Haji Agus Salim dan Konflik Politik Sarekat Islam* (Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2014), 19.

<sup>31</sup> Kementerian Penerangan Republik Indonesia, *Kepartaian di Indonesia* (Yogyakarta, 1950), 144.



di setiap sendi ekonomi. Salah satu program yang digagas yaitu membuat Undang-Undang untuk membatasi kekuasaan perusahaan asing.<sup>32</sup> Anggaran Dasar tersebut memperlihatkan bahwa PKI menginginkan tatanan kenegaraan yang bebas dari penjajahan serta bentuk penjajahan baru sehingga masyarakat berdaulat atas alat-alat produksi dalam sistem ekonomi.

Pada September 1955, sepuluh tahun setelah Indonesia merdeka dari penjajah, PKI diklaim memiliki anggota sebanyak 150.000 orang.<sup>33</sup> Pada periode tersebut, PKI tidak hanya sebagai partai terbesar keempat di Indonesia dengan presentase 16,4 % suara di bawah PNI (22,3 %), Masyumi (20,9 %) dan Nahdhatul Ulama (18,4 %),<sup>34</sup> tetapi juga menjelma sebagai partai dengan mobilitas yang tinggi serta memiliki kemampuan agitasi yang tidak dimiliki oleh partai manapun. Hal ini juga memperlihatkan PKI sebagai partai yang fluktuatif dengan elektabilitasnya yang sempat menurun akibat pemberontakan tahun 1926 dan 1948. Akan tetapi, pada tahun 1955 PKI muncul sebagai partai papan atas dengan jatah 39 kursi dalam parlemen.<sup>35</sup> Hasil dari pemilu ini, menjadi tanda bahwa memang benar PKI sangat diperhitungkan dalam kancah politik domestik pada saat itu.

Dalam mewujudkan cita-cita revolusi, PKI juga terkoordinasi dengan organisasi internasional yang secara monolitik mengontrol setiap kegiatan organisasi komunis di berbagai negara. Organisasi ini disebut *Comintern* (Komunisme Internasional).<sup>36</sup> Pada saat memperingati Revolusi Soviet ke-40, D.N. Aidit menekankan bahwa PKI harus belajar dari semua partai sekawan dan harus mempelajari pengalaman Partai Komunis Uni Soviet (PKUS) dan Partai Komunis Cina (PKC) yang telah merebut kekuasaan dengan kekuatan

---

<sup>32</sup> Ibid, 147.

<sup>33</sup> Peter Kasenda, *Sukarno, Marxisme dan Leninisme* (Depok: Komunitas Bambu, 2014), 103.

<sup>34</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia 2009), 434.

<sup>35</sup> Ibid, 434.

<sup>36</sup> Peter Kasenda, 4.

bersenjata.<sup>37</sup> Tetapi, PKI juga harus mempertimbangkan jalan-jalan damai dan melewati pembelaan dewan perwakilan. Hal ini juga tidak hanya karena berkembangnya garis Khrushchev di Soviet, dan juga diterima oleh mayoritas partai komunis yang ada di dunia, tetapi juga karena situasi dalam negeri di Indonesia sendiri.<sup>38</sup> Di sisi lain, gerakan akar rumput juga menjadi inti dari ajaran komunisme. Hal ini yang dipelajari oleh PKI dari PKC pada tahun 1950-an.<sup>39</sup> Penerapan semacam ini sesuai dengan keadaan rakyat Indonesia yang masyarakatnya mayoritas adalah kaum tani. Dapat dilihat, PKI juga tidak lupa mempelajari serta berkoordinasi dengan partai komunis di negara lainnya guna merealisasikan revolusi sosialis dunia.

Tidak dapat disangkal, bahwa PKI merupakan partai yang memiliki pengaruh serta kekuatan yang besar dalam kancah politik Indonesia, khususnya setelah tahun 1955. Pada akhir 1960, awal dan pertengahan 1961, serta awal 1962, Presiden Soekarno berusaha untuk memasukkan PKI ke dalam kabinet dengan semboyan Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis).<sup>40</sup> Pada tahun 1962 PKI mengklaim jumlah anggotanya meningkat secara signifikan, dan menjadi partai komunis terbesar ketiga setelah Partai Komunis Uni Soviet (PKUS) dan Partai Komunis Cina (PKC). PKI memiliki pengaruh yang besar terhadap gerakan buruh, tani, wanita dan organisasi pemuda. Di saat partai politik lainnya sibuk mempertahankan keutuhan struktur organisasinya, PKI telah berhasil mendidik ratusan ribu anggotanya dalam kursus kader dan memasukkan pahamnya kepada masyarakat umum.<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> Ibid, 182.

<sup>38</sup> Ibid, 183.

<sup>39</sup> Ahmad Fathul Bari, *Strategi Partai Komunis Indonesia terhadap Petani dan Pengaruhnya di Jawa Timur (1953-1965)* ( Jakarta: Universtas Indonesia, 2008), 6.

<sup>40</sup> Peter Kasenda, 115

<sup>41</sup> Ibid,116.

Ideologi komunisme yang menjadi dasar dari implementasi berpikir PKI, merupakan ideologi kiri yang terkoneksi secara internasional. Ideologi kiri dianggap sebagai ideologi antitesis dari kapitalisme. Atas dasar sifat kapitalisme yang internasional, maka perjuangan komunisme melawan kapitalisme haruslah sebagai perjuangan berskala internasional pula.<sup>42</sup> Dalam persoalan ini, PKI memiliki banyak tujuan yang harus dicapai antara lain menguasai pemerintahan domestik, menghapuskan pengaruh kapitalisme di Indonesia dan merealisasikan revolusi komunisme dunia. Untuk merealisasikan hal ini, PKI melakukan serangkaian agenda mulai dari ikut dalam pemilu, mengorganisir petani dan buruh serta terkoordinasi dengan *Comintern*.

Dalam konteks hari ini, membahas dinamika PKI dengan komunisme sebagai ideologinya adalah sesuatu yang menarik sekaligus menantang, karena hingga sekarang fakta sejarahnya masih kabur. Peristiwa G30S yang penuh kepentingan hingga pengaruh besar rezim Orde Baru membuat PKI sangat terpojok dan dipenuhi oleh stigma negatif. Kaum komunis dianggap ateis, pemberontak, makar dan radikal. Pola pikir seperti di atas dapat dikatakan masih terhegemoni oleh rezim Orde Baru yang dekat dengan Barat. Ditambah lagi dengan keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang tertuang dalam TAP MPRS/XXVI/1966 berisi tentang PKI yang dilarang serta diharamkan membaca dan menyebarkan marxisme-leninisme, semakin membuat komunisme sebagai sejarah kelam yang tidak patut lagi untuk diperbincangkan.<sup>43</sup> Keputusan MPRS ini menjadi bukti bahwa TAP MPRS/XXVI/1966 merupakan realisasi Doktrin Truman sebagai Presiden Amerika Serikat waktu itu, tentang *Policy of Containment* yang bertujuan untuk melenyapkan komunisme di seluruh dunia. Hal ini

---

<sup>42</sup> Imam Yudotomo, 23

<sup>43</sup> Peter Kasenda, 140.

memperlihatkan bahwa adanya fenomena internasional yang bermain dalam usaha membendung pengaruh komunisme di setiap negara.<sup>44</sup>

## 1.2. Rumusan Masalah

Pada pemilu tahun 1955, PKI muncul sebagai salah satu partai yang berpengaruh setelah menduduki peringkat empat setelah PNI, Masjumi dan Nahdhatul Ulama. Seiring dengan itu, PKI merasa berpeluang melakukan revolusi di Indonesia yang dianggap masih terhegemoni oleh sistem kapitalisme. Hal ini menarik karena PKI merupakan partai yang terkoneksi secara internasional, karena terkoordinasi dalam organisasi *Comintern*. Di satu sisi, PKI sebagai partai politik di Indonesia bertujuan untuk menguasai pemerintahan secara domestik negara, di sisi lain PKI juga membawa misi *Comintern* untuk melawan kapitalisme dan mewujudkan Indonesia yang komunis demi tujuan revolusi sosialis dunia. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat bagaimana upaya PKI dalam melakukan *counter hegemony* terhadap kapitalisme di Indonesia, sebagai langkah untuk mewujudkan tujuan-tujuan PKI dalam konteks partai politik dan kelompok yang berideologi komunis.

## 1.3. Pertanyaan Penelitian

Dari permasalahan tersebut, timbul pertanyaan penelitian, yaitu:

Bagaimana upaya Partai Komunis Indonesia dalam melakukan *counter hegemony* terhadap kapitalisme di Indonesia ?

## 1.4. Tujuan Penelitian

---

<sup>44</sup> Suar Suroso, vi.

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mendeskripsikan posisi Partai Komunis Indonesia sebagai partai yang membawa ideologi internasional di era 1955 sampai 1965.
2. Mendeskripsikan upaya PKI dalam melakukan *counter hegemony* terhadap kapitalisme di Indonesia.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Secara akademis, penulis berharap skripsi ini memberikan kontribusi dalam memperkaya keilmuan, terutama keberadaan ideologi komunisme dalam konteks hubungan internasional. Selain itu secara spesifik dalam konteks keilmuan, skripsi ini diharapkan mampu memberikan deskripsi tentang upaya sebuah partai dalam melakukan *counter hegemony* terhadap sebuah ideologi di Indonesia.
2. Secara praksis, peneliti mengharapkan tulisan ini dapat memberikan sumbangan dalam usaha rekonsiliasi kembali fakta sejarah terkait dengan PKI di Indonesia dan komunisme di dunia. Di sisi lain, karya ini diharapkan mampu menggambarkan fakta sejarah perpolitikan di Indonesia secara proporsional.

### 1.6. Studi Pustaka

Pada dasarnya, penelitian skripsi tentang pengaruh PKI dalam kondisi politik Indonesia sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain sebelumnya, baik itu dalam konteks pembahasan tentang susunan agenda kepartaian maupun strategi partai dalam mendekati rakyat. Tetapi, penulis masih belum menemukan tulisan yang membahas dinamika PKI dilihat dengan kaca mata serta pendekatan dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, skripsi yang berjudul upaya PKI dalam melakukan *counter hegemony* terhadap kapitalisme di Indonesia sangat menarik untuk dibahas karena akan memperkaya pembahasan tentang komunisme itu sendiri.

Salah satu tulisan yang mendukung proses penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Ami Abdullah Fahmi dengan judul *Gerakan Partai Komunis Indonesia: Strategi Partai dalam Mencapai Kekuasaan Politik di Indonesia (1920-1966)*.<sup>45</sup> Penelitian ini membahas tentang sepaik terjang dari PKI, melihat kondisi PKI sebagai partai yang sangat fluktuatif dinamikanya. Sempat melakukan aksi yang sering dianggap sebagai pemberontakan, PKI terus bangkit dan mampu menjadi partai yang sangat berpengaruh kisaran 1955-1965. Komunisme di Indonesia yang diwakili oleh Partai Komunis Indonesia merealisasikan esensi Marxisme yang berorientasi internasional, baik itu terinspirasi oleh komunisme Uni Soviet dan juga seiring dengan komunisme Cina. Di sisi lain, pada tahun 1960-an terdapat tiga kekuatan besar yang sangat berpengaruh di Indonesia yaitu PKI, presiden Soekarno dan TNI AD. Konsep Nasakom membuat hubungan antara PKI dan Soekarno sebagai hubungan saling ketergantungan. Soekarno membutuhkan hubungan dengan PKI dalam mewujudkan gagasan PNI (nasionalisme), NU (agama) dan PKI (komunisme). Sedangkan PKI sangat membutuhkan Soekarno sebagai pelindung dari

---

<sup>45</sup> Ami Abdullah Fahmi, *Gerakan Partai Komunis Indonesia: Strategi Partai dalam Mencapai Kekuasaan Politik di Indonesia (1920-1966)* (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013).

TNI-AD yang sejak awal tidak setuju dengan gagasan komunis karena tidak sesuai dengan kultur budaya Indonesia sendiri dan bertentangan dengan Pancasila khususnya sila pertama.

Selain itu, ada sebuah skripsi berjudul *Strategi Partai Komunis Indonesia terhadap Petani dan Pengaruhnya di Jawa Timur (1953-1965)*,<sup>46</sup> yang bisa membantu dalam membahas dinamika Partai Komunis Indonesia di tatanan akar rumput. Skripsi dari Ahmad Fathul Bari ini menitikberatkan kepada pembahasan tentang petani sebagai basis untuk memperjuangkan tujuan politiknya. Di dalam skripsi ini tertulis bahwa Partai Komunis Indonesia terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Cina yang memfokuskan sektor pertanian adalah komunitas akar rumput yang paling strategis untuk menjadi landasan prilaku partai. Cina dianggap sebagai contoh pengejawantahan sosialisme dan komunisme di Asia karena lebih menekankan inti pergerakan pada kaum petani. Berbeda dengan Uni Soviet yang menjadikan kaum buruh sebagai pilar revolusi. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Cina cenderung cocok dilakukan di Indonesia karena kebanyakan masyarakat Indonesia berkegiatan di sektor agraris. Selain menjadi revisionis dari ideologi marxis di Asia Tenggara, wilayah Cina juga lebih dekat secara geografis dengan Indonesia. Aidit sendiri menyebut Cina dengan sebutan “tetangga besar kita”. Model gerakan komunis Cina sangat cocok dilakukan di Indonesia, karena wilayah pedesaan sama-sama mendominasi kawasan di dua negara ini, dan di wilayah pedesaan mayoritas masyarakat adalah petani. Dengan memperjuangkan petani berdasarkan reformasi agraria ini, PKI mendapat hati masyarakat dan menuai hasil di Pemilu 1955.

---

<sup>46</sup> Ahmad Fathul Bari, *Strategi Partai Komunis Indonesia terhadap Petani dan Pengaruhnya di Jawa Timur (1953-1965)* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008).

Buku karya Suar Suroso yang berjudul *Akar dan Dalang*<sup>47</sup> merupakan tulisan yang penting dalam melihat dinamika PKI sendiri. Dalam buku ini, pemaparan tentang agenda PKI dibuat secara terperinci, mulai dari awal mula terbentuknya PKI ketika Sarekat Islam (SI) terpecah menjadi SI Putih dan SI Merah, hingga ke peristiwa G30S dengan pengulasan yang lebih berimbang. Selain itu, PKI tidak hanya dipandang sebagai partai yang berpengaruh di dalam negeri saja, tetapi juga partai yang ditakuti oleh beberapa negara kapitalis di dunia, khususnya Amerika Serikat. Suar Suroso dengan gemilang membongkar semua persekongkolan antara AS dengan Inggris untuk menumbangkan Presiden Soekarno dan menghancurkan PKI yang sudah dimulai sejak tahun 1960-an. Hal ini juga menjadi kelanjutan dari Peristiwa Madiun 1948 yang dirintis oleh Merle Cochran dengan usulannya “*Red Drive Proposal*” pada Muhammad Hatta, sebagai lanjutan dari Doktrin Truman sebagai Presiden AS tentang “*Policy of Containment*”. Doktrin ini dilancarkan untuk melakukan pembasmian komunisme sejagad serta memusnahkan setiap ajarannya.

Tahun 1955-1965, PKI berada di bawah kepemimpinan D.N. Aidit, sehingga pembahasan tentang Aidit sangat cocok untuk dielaborasi lebih lanjut. Seri buku TEMPO yang membahas tentang orang-orang kiri di Indonesia menjadi sangat menarik untuk dibahas, dalam hal ini yang berjudul *Aidit: Dua Wajah Dipa Nusantara*.<sup>48</sup> Buku ini mengulas tentang kehidupan Dipa Nusantara Aidit dari kelahirannya di Belitung, 30 Juli 1923 hingga kejatuhan karier politiknya pada peristiwa G30S. D.N. Aidit yang sebenarnya diberi nama Achmad Aidit oleh pasangan orang tua Abdullah Aidit dan Mailan, merupakan salah satu tokoh terpenting dalam perjalanan Partai Komunis Indonesia. Bersama Muhammad Hakim Lukman dan Njoto, Aidit memulihkan kembali situasi intern partai

---

<sup>47</sup> Suar Suroso, *Akar dan Dalang* (Bandung: CV. Ultimus, 2013)

<sup>48</sup> Tempo, *Aidit: Dua Wajah Dipa Nusantara*. (Jakarta: Tempo, 2010)



setelah lumpuh karena kegagalan peristiwa Madiun 1948. Ketiga tokoh PKI ini dikenal dengan julukan *the three musketeers* karena bersama-sama membangun kembali kondisi partai dengan posisi masing-masing, yaitu Aidit berperan menjadi Sekretaris Jenderal, M.H. Lukman sebagai Wakil Sekjen I dan Njoto yang diamanahkan sebagai Wakil Sekjen II. Pada masa trisula ini juga, PKI muncul diurutan keempat dalam Pemilu 1955 setelah PNI, Masyumi dan Nahdhatul Ulama. Hasil ini menjadi batu loncatan dalam perjalanan partai menurut Aidit. Buku ini juga memberikan gambaran bahwa D.N. Aidit memberikan peran yang signifikan baik dalam penyusunan prinsip dasar partai yang berlandaskan marxisme-leninisme maupun dalam pembangunan jaringan akar rumput dalam sekop petani dan buruh. Aidit juga memiliki pemikiran yang progresif. Hal ini terlihat dari upaya pengambilalihan partai dari apa yang disebut “kalangan tua”, yang menurut Aidit lamban dan tidak revolusioner.

Setelah itu, buku *Sukarno, Marxisme dan Leninisme: Akar Pemikiran Kiri dan Revolusi Indonesia*,<sup>49</sup> yang ditulis oleh Peter Kasenda merupakan bahan yang sangat membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian ini. Soekarno pada tahun 1955-1965 berposisi sebagai presiden dianggap memiliki hubungan yang dekat dengan tokoh-tokoh PKI, sebut saja D.N. Aidit dan M.H. Lukman. Di sisi lain, Soekarno juga mengakui bahwa Marx, Engels dan Lenin adalah tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh dalam pemikirannya. Selain itu, pokok pikiran Soekarno tentang marhaenisme juga dekat secara defenisi dengan ajaran-ajaran komunisme. marhaenisme yang digagas oleh Soekarno bertitik tumpu kepada pergaulan hidup antara kaum petani kecil, buruh kecil, pedagang kecil, dan pelayar kecil. Sejalan dengan pola perjuangan komunisme yang setiap dimensi

---

<sup>49</sup> Peter Kasenda, *Sukarno, Marxisme dan Leninisme: Akar Pemikiran Kiri dan Revolusi Indonesia* (Depok: Komunitas Bambu, 2014).

berpatok kepada rakyat. Walaupun bagi Soekarno ada beberapa perbedaan antara marhaenisme dan komunisme, tetapi tetap menyatakan rakyat atau masyarakat adalah kunci dari suatu pemerintahan. Salah satu kejadian penting dalam melihat ideologi pemimpin bangsa saat itu adalah semboyan beliau yang berbunyi Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis). Artinya, ada upaya dari Soekarno untuk memberikan ruang lebih terhadap komunisme khususnya dalam kabinet pemerintahan. Gagasan tentang komunisme sangat cocok bagi Soekarno untuk menyusun agenda-agenda terkait dengan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat fakta-fakta sejarah yang menjelaskan tentang kedekatan Soekarno dengan tokoh-tokoh kiri yang berafiliasi dengan PKI.

## 1.7. Kerangka Konseptual

### 1.7.1. Ideologi

Ideologi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata yaitu *ideos* yang berarti pemikiran, dan *logos* yang artinya logika, ilmu atau pengetahuan. Merujuk kepada padanan kata tersebut, ideologi dapat didefinisikan sebagai ilmu mengenai keyakinan dan cita-cita.<sup>50</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ideologi merupakan rumusan alam pikiran yang terdapat di berbagai subjek atau kelompok masyarakat yang ada dan dijadikan dasar dalam merealisasikan suatu tujuan. Oleh karena itu, ideologi pada dasarnya tidak serta merta hanya ada pada entitas negara, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diyakini oleh organisasi dalam negara, seperti partai politik dan asosiasi politik.<sup>51</sup>

Pada dasarnya, akar ideologi berangkat dari tiga pendekatan filsafat, antara lain:

#### 1. Filsafat Idealisme

---

<sup>50</sup> Ali Syariati, *Tugas Cendekiawan Muslim* (Yogyakarta: Salahuddin Press, 1982), 7.

<sup>51</sup> Nur Sayyid Santoso Kristeva, 2.

Filsafat idealisme berangkat dari nilai-nilai individualisme, yang dalam kehidupan berpolitik menjadi cikal bakal liberalisme dan kapitalisme. Ide adalah kekuatan dasar dan manusia berposisi sebagai pusat di alam semesta (*centre of nature*). Pemahaman ini membangun kehidupan keagamaan dalam konteks negara adalah sebagai dua hal yang terpisah (*separation*), walaupun dalam seremonial, ritual agama tetap mendapatkan perannya.<sup>52</sup>

## 2. Filsafat Materialisme

Filsafat materialisme mengedepankan rasa kolektivitas serta perjuangan kelas. Dalam kehidupan berpolitik filsafat materialisme telah melahirkan ideologi Sosialisme Komunisme. Materi (ekonomi) menjadi kekuatan dasar dalam terjadinya perubahan sejarah. Hal ini membangun suatu konsepsi bahwa hubungan negara dengan agama adalah dipertentangkan (*conflict*). Agama sebagai faktor penghambat dan candu di dalam masyarakat.<sup>53</sup>

## 3. Filsafat Teologisme

Pendekatan filsafat ini dibagi menjadi dua. Pertama, paham agama yang menempatkan ajaran Tuhan sebagai sentral dalam kehidupan bernegara, tetapi dalam realisasinya, pemuka agama muncul sebagai sosok yang dikultuskan. Kedua, paham agama yang memang menempatkan ajaran Tuhan sebagai faktor utama sebagai pencerah. Agama sebagai suatu yang suci keberadaannya, serta menghindari pengkultusan serta pemistikan. Agama ada sebagai pembimbing (*guidens*).<sup>54</sup>

Antonio Gramsci berpendapat bahwa ideologi tidak hanya sekedar sistem ide. Ideologi dibedakan atas sistem yang berubah-ubah (*arbitrary system*) yang digagas oleh

---

<sup>52</sup> Ibid, 8

<sup>53</sup> Ibid, 9.

<sup>54</sup> Ibid.

intelektual dan ideologi organik yang bersifat historis (*historically organic ideologies*), yaitu ideologi yang berkembang merujuk kepada kondisi sosial tertentu. Ideologi menjadi dasar bagi manusia untuk bertindak serta memiliki pengaruh besar dalam aspek psikologis.<sup>55</sup>

Gramsci menegaskan bahwa ideologi bukanlah sesuatu yang berada hanya di alam pemikiran semata dan berada di luar aktivitas politik atau aktifitas praktis manusia lainnya. Sebaliknya, ideologi memiliki eksistensi material dalam kehidupan nyata serta aktifitas praktis<sup>56</sup> Sebagai penjabaran, dapat dikatakan bahwa ideologi mempunyai eksistensi materialnya, dalam artian bahwa ideologi ada dalam praktik-praktik sosial setiap orang dan dalam lembaga-lembaga serta organisasi-organisasi sebagai instrumen praktik-praktik sosial itu berlangsung. Organisasi tersebut dapat berupa partai politik, serikat dagang dan organisasi lainnya yang menjadi bagian dari masyarakat sipil, aparat negara, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Di sisi lain, sesuatu yang harus diperhatikan adalah ideologi tidak boleh direduksi semata-mata mengacu kepada praktik-praktik sosial, karena ideologi tidak hanya mempunyai eksistensi material saja tetapi ideologi juga harus matang dalam tatanan ide, serta melalui hubungan antara konsep dan kenyataan.<sup>57</sup>

### 1.7.2. Counter Hegemony

Dalam memaparkan beberapa penjelasan tentang *counter hegemony*, penulis berusaha untuk menggabungkan teori-teori Antonio Gramsci dengan penteor Neo-Gramscian yaitu Robert W. Cox. Gramsci dipercaya sebagai pemikir yang meletakkan dasar awal tentang teori *counter hegemony*, lalu Cox sebagai penteor yang

---

<sup>55</sup> Roger Simon, *Gramsci's Political Thought*, ed. Kamdani dan Imam Baehaqi (Yogyakarta: INSIST, 2004), 83.

<sup>56</sup> Ibid, 84.

<sup>57</sup> Ibid, 86.

melanjutkan buah pikir dari Gramsci dan juga diakui sebagai penteoris hubungan internasional.<sup>58</sup> Perspektif Gramscian juga diakui sebagai perkembangan baru dalam studi ilmu hubungan internasional dan ekonomi politik internasional. Hal ini dirintis oleh Robert Cox sebagai sebuah gagasan untuk angkat kaki dari tatanan dunia yang kapitalistik.<sup>59</sup> Di sisi lain, penulis juga mencoba untuk terlebih dahulu menjelaskan tentang hegemoni lalu dilanjutkan dengan kontra terhadap hegemoni menurut kerangka pemikiran Gramsci dan Cox.

### **1.7.2.1. Hegemoni**

Bagi Gramsci, hegemoni bukanlah hubungan dominasi kekuasaan melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis.<sup>60</sup> Hegemoni ada sebagai organisasi konsensus.<sup>61</sup> Gramsci menggambarkan hegemoni sebagai :

1. Orang-orang menyesuaikan diri karena takut akan konsekuensi berupa sanksi apabila tidak mampu sesuai dengan sistem.
2. Orang menyesuaikan diri karena terbiasa mengikuti tujuan-tujuan dengan cara-cara yang cenderung tetap, dan beraktivitas sesuai dengan pola-pola tertentu.

---

<sup>58</sup> Benni Wijaya, *Gerakan Pertanian Organik Sumatera Barat sebagai Gerakan Counter Hegemoni Liberalisasi Pertanian Global di Indonesia* (Padang: Universitas Andalas, 2013), 17.

<sup>59</sup> Muhadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia Ketiga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 17.

<sup>60</sup> Roger Simon, 19.

<sup>61</sup> Ibid, 20.

3. Konformitas yang muncul dari tingkah laku mempunyai tingkat-tingkat kesadaran dan persetujuan dengan unsur tertentu dalam masyarakat.<sup>62</sup>

Lebih jelas lagi, Gramsci mendefinisikan hegemoni sebagai moral kepemimpinan (*direzione*) dan intelektual sebagai elemen penyusun utama persetujuan dan bersifat persuasif. Sebuah kelompok atau kelas dapat dikatakan sebagai hegemon apabila mereka mampu mengartikulasikan seluruh sistem kepercayaan budaya masyarakat dan ideologi yang ajaran-ajarannya diterima sebagai hal yang berlaku universal dan diterima oleh masyarakat umum.<sup>63</sup>

Robert Cox sebagai penteoris hubungan internasional memaparkan pandangan yang sejalan dengan Gramsci. Cox memulai dengan anggapan bahwa teori selalu untuk seseorang dan untuk beberapa tujuan.<sup>64</sup> Dengan kata lain, hegemoni yang dibawa melalui dominasi intelektual dan budaya politik merupakan sebuah kemasukan yang dibawa oleh pihak hegemon dalam pola penguatan kekuasaan sehingga terbentuk sebuah hegemoni yang berjalan dengan baik. Cox membedakan antara *problem solving theory* yang menerima sesuatu dari ketentuan yang telah ada, dan *critical theory* yang berusaha untuk menentang tatanan yang sudah ada serta mengusahakan untuk terjadinya perubahan yang emansipatoris.<sup>65</sup>

Cox memakai konsep hegemoni sebagai cara menjelaskan kontrol hegemoni dalam konteks masyarakat kapitalis. Sistem yang kapitalistik memakai pola-pola hegemoni dalam

---

<sup>62</sup> Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 126.

<sup>63</sup> Benedetto Fontana, *Hegemony and Power On the Relation between Gramsci and Machiavelli* (London: University of Minnesota Press, 1993), 140.

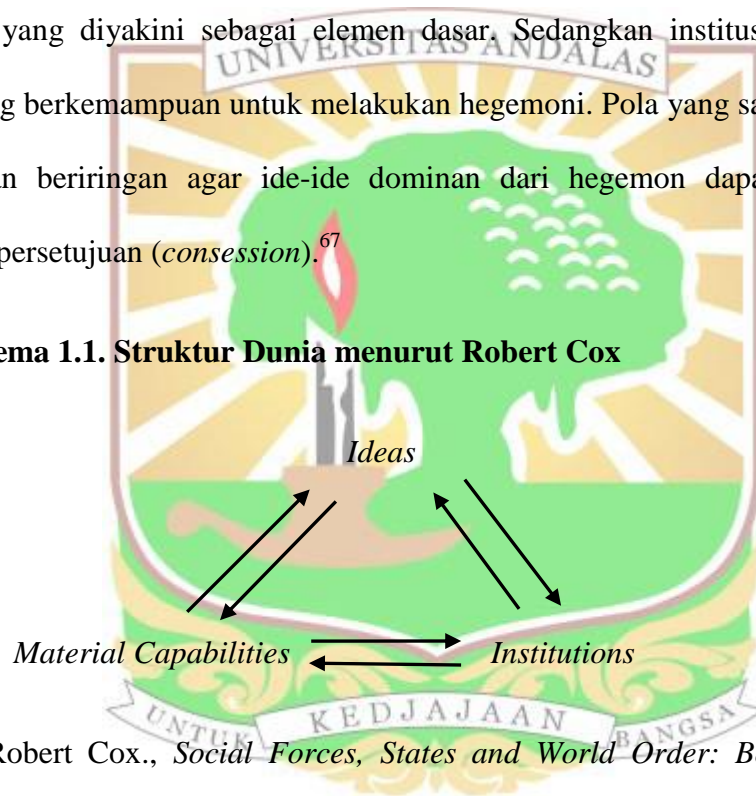
<sup>64</sup> Robert Cox, *Social Forces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory* (Millenium: Journal of International Studies 10, 1981), 128.

<sup>65</sup> Ranny Emilia, *Teori-Teori Hubungan Internasional* (Universitas Andalas, Padang), 92.

rangka melanggengkan ide-ide dominan mengenai tatanan dunia menyangkut pola hubungan antara kekuatan materi, ide-ide dan institusi-institusi pada level global.<sup>66</sup>

Pasca Perang Dunia II, Cox memaparkan bahwa struktur dunia berada pada kondisi yang neoliberal. Hal ini dibentuk atas keterkaitan yang sinergis antara ide-ide (*ideas*), material (*material capabilities*) dan institusi (*institutions*). Material dapat didefinisikan sebagai instrumen untuk melakukan kegiatan produksi. Ide merupakan serangkaian nilai-nilai yang diyakini sebagai elemen dasar. Sedangkan institusi berposisi sebagai wadah yang berkemampuan untuk melakukan hegemoni. Pola yang saling mempengaruhi ini berjalan beriringan agar ide-ide dominan dari hegemon dapat diterima melalui hubungan persetujuan (*consession*).<sup>67</sup>

### Skema 1.1. Struktur Dunia menurut Robert Cox



Sumber: Robert Cox., *Social Forces, States and World Order: Beyond International Relations Theory*

Dalam tulisannya yang berjudul *Social Forces, State and World Order: Beyond International Relations Theory*,<sup>68</sup> Cox menyebut hegemoni sebagai struktur nilai dan kesepahaman terhadap suatu tatanan, yang disepakati semua sistem negara dan non-negara.

<sup>66</sup> Martin Griffiths, 159.

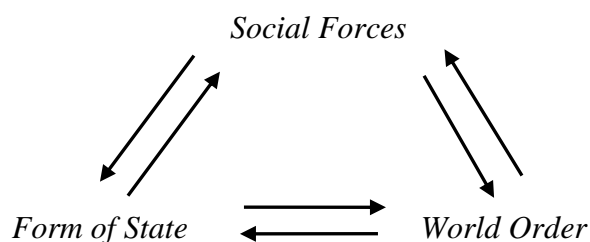
<sup>67</sup> Robert Cox, *Social Forces, States and World Order: Beyond International Relations Theory*, 136.

<sup>68</sup> Robert Cox, *Social Forces, States and World Order: Beyond International Relations Theory*, 138.

Hegemoni tercipta atas adanya hubungan yang kompleks antara kekuatan sosial (*social forces*), bentuk negara (*form of state*) dan tatanan dunia (*world order*). Cox menjelaskan bahwa *world order* merupakan sistem nilai dan kesepahaman sebagai ide yang ditanamkan oleh hegemon ke elemen yang terhegemoni dalam struktur internasional. Ide yang disepakati tersebut dilegitimasi oleh badan atau institusi sebagai perpanjangan tangan hegemon. Badan atau institusi tersebut memiliki otoritas dalam membuat kebijakan. Hal tersebut dikategorikan ke dalam *form of state*. Di sisi lain, hegemoni tidak akan berjalan dengan baik apabila ide-ide dominan tersebut tidak terartikulasi ke elemen masyarakat secara umum. Realitas sosial tersebut berposisi sebagai *social forces* yang teraplikasi dalam dinamika sosial. *Social Forces* dijalankan oleh kelompok-kelompok yang terepresentasi oleh kelompok-kelompok seperti partai, organisasi keagamaan, elemen intelektual, media massa dan seniman



**Skema 1.2. Struktur Hegemoni menurut Robert Cox**



Sumber: Robert Cox, *Social Forces, State and World Orders: Beyond International Relations Theory*.



Cox menambahkan bahwa ada tiga hal yang harus diartikulasikan ke dalam realitas struktur internasional dalam melanggengkan ide-ide hegemon antara lain model produksi (*mode of production*), bentuk negara (*form of state*) dan tatanan dunia (*world order*). Model produksi diposisikan sebagai serangkaian ide-ide yang diimplementasikan ke tata cara dalam melakukan proses produksi. Di sisi lain, bentuk negara memainkan peran penting dalam guna mengkonstruksi ide-ide dominan hegemon ke yang terhegemoni. hal tersebut diimplementasikan agar pihak hegemon mampu melegitimasi kebenaran idenya dalam konteks tatanan dunia. Merujuk kepada paparan Cox, ketiga elemen tersebut juga dapat dimodifikasi ulang dalam konteks melakukan *counter hegemony*.<sup>69</sup>

Cox juga memberikan pandangan teoritis mengenai apa yang diistilahkan sebagai “internasionalisasi negara”.<sup>70</sup> Dengan ini Cox mengacu kepada proses yang dilakukan oleh institusi negara dengan kebijakan-kebijakannya yang berada pada koridor perkembangan perekonomian dunia yang kapitalis. Dalam proses ini, adanya formasi konsensus negara-negara berdasarkan perekonomian dunia yang kapitalistik diakui sebagai kerangka ideologis secara umum.<sup>71</sup>

#### 1.7.2.2. *Organic Intellectuals*

Upaya untuk menciptakan tatanan hegemoni yang baru, dalam konteks berlawanan dengan sistem kapitalis, harus dilakukan dengan melakukan penyadaran,

---

<sup>69</sup> Robert Cox and Timothy J. Sinclair, *Approaches to World Order* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 13.

<sup>70</sup> Martin Griffiths, 160.

<sup>71</sup> Robert Cox, *Production, Power and World Order: Social Forces in the Making of History* (New York: Columbia University Press, 1987), 254.

merubah cara berpikir di dalam sistem kemasyarakatan. Hal ini yang disebut Gramsci sebagai revolusi intelektual dan moral.<sup>72</sup>

Sebagai usaha untuk merealisasikan revolusi intelektual dan moral, Gramsci mulai dengan menghapus perbedaan antara marxisme sebagai filsafat dengan marxisme sebagai kesadaran aktual masyarakat. Gramsci beranggapan bahwa semua manusia adalah filosof karena memiliki modal gagasan masing-masing tentang konsepsi dunia. Tetapi, cara manusia untuk mempersepsikan dunia sebagai pemikiran mereka seringkali bertentangan karena menganggap ketidakadilan serta penindasan adalah sesuatu yang alamiah dan tidak dapat diubah. Gramsci memakai istilah pemikiran awam (*common sense*) untuk menggambarkan orang-orang yang tidak kritis dalam memandang dunia dan tidak sadar sedang dihegemoni.<sup>73</sup>

Peran intelektual dalam masyarakat sipil dan dalam menuju transisi menuju sosialisme merupakan tema yang dibahas secara luas oleh Gramsci, yang tertuang dalam *Prison Notebooks*. Gramsci begitu menekankan arti penting kaum intelektual sebagai agen yang bertugas untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat dan menjadi motor untuk melakukan agenda perlawanan terhadap sistem yang menghegemoni tersebut.<sup>74</sup>

Ada dua pokok pikiran yang perlu diperhatikan dari pandangan Gramsci terhadap intelektual, yaitu:

---

<sup>72</sup> Roger Simon, 26.

<sup>73</sup> Ibid, 27.

<sup>74</sup> Ibid, 139.

1. Perlunya menghapus perbedaan antara kerja manual dan kerja intelektual yang telah berjalan lama di bawah payung kapitalisme dalam proses produksi, masyarakat sipil dan juga dalam aparaturnegara.
2. Hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Kondisi kekuasaan yang tercipta dari apa yang dinamakan monopoli pengetahuan oleh kelas yang berkuasa. Dalam konteks ini, perlu adanya perubahan mendasar dalam hubungan antara manusia dan pengetahuan dalam revolusi menuju tatanan yang sosialis.<sup>75</sup>

Lebih lanjut lagi, Gramsci menolak secara terang-terangan pandangan tradisional terhadap intelektual yang hanya terdiri dari sastrawan, filosof, seniman serta jurnalis. Aktivitas intelektual tidak hanya berpikir secara intrinsik serta berada dalam alam pikir saja, tetapi juga harus dijalankan dalam perbuatan yang tampak. Jadi dapat dikatakan bahwa setiap orang adalah intelektual, tetapi tidak setiap orang menjalankan fungsi intelektual.<sup>76</sup>

Setelah itu, Gramsci memperkuat pemahaman tentang intelektual sebagai kaum yang memiliki fungsi organisatoris dalam setiap elemen masyarakat. Gramsci menolak anggapan umum tentang intelektual yang hanya sebatas sebagai penulis, pemikir dan seniman. Intelektual adalah organisator seperti pegawai bank ataupun pemimpin politik yang tidak hanya berguna bagi masyarakat sipil tetapi juga dalam keberadaan alat-alat produksi.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Ibid, 140.

<sup>76</sup> Ibid, 141.

<sup>77</sup> Ibid, 141.

Selanjutnya, Gramsci memperdalam pemikirannya dengan membedakan antara intelektual ‘tradisional’ dengan intelektual ‘organik’. Intelektual tradisional cenderung untuk merestorasi kelas yang berkuasa. Gramsci menambahkan bahwa intelektual tradisional adalah intelektual yang dihasilkan oleh kelas kapitalis itu sendiri. Artinya, intelektual tradisional tidak mampu memberikan perubahan terhadap tatanan hegemonik yang menindas.<sup>78</sup>

Mengacu kepada pendapat Gramsci tentang intelektual organik, ia mengatakan bahwa jika kelas pekerja ingin beranjak dari kelas rendah untuk mengambil alih kepemimpinan bangsa, dan membangun kesadaran politik melalui reformasi moral dan intelektual. Intelektual organik berperan sebagai motor pergerakan dalam membangun tatanan hegemoni baru.<sup>79</sup>

Sebagai penjelas terhadap keberadaan intelektual organik, Gramsci berpendapat bahwa partai revolusioner harus memainkan peran kunci sebagai intelektual organik kelas pekerja. Jadi, anggota partai harus terdiri dari orang-orang yang intelektual. Partai yang revolusioner sedikit banyak terhimpun dari anggota yang memiliki pendidikan tinggi sampai menengah. Tetapi, yang paling penting dari keberadaan partai revolusioner sendiri adalah perannya sebagai penggagas revolusi intelektual dan moral.<sup>80</sup> Secara langsung, Gramsci juga menyatakan bahwa peran partai komunis adalah untuk terlibat dan memimpin suatu perjuangan besar dan memiliki berbagai segi demi hegemoni.<sup>81</sup> Dalam

---

<sup>78</sup> Ibid, 142.

<sup>79</sup> Ibid, 149.

<sup>80</sup> Ibid, 150.

<sup>81</sup> Martin Griffiths, *Fifty Key Thinkers in International Relations*, ed. Mahyudin dan Izamuddin Makmur (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 159.

hal ini Gramsci menitikberatkan keberadaan serta pengaruh dari partai komunis yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan serta pengaruh dalam aspek pemerintahan.

Mengacu kepada gagasan intelektual organik, Cox menambahkan serangkaian usaha untuk melakukan perlawanan terhadap sistem yang menghegemoni adalah melalui organisasi politik yang dijalankan secara efektif (*political organization*). Cox menganalogikan organisasi politik ini sebagai *Gramsci's Modern Prince*. Intelektual organik yang berperan sebagai motor perjuangan terkonsolidasi dalam sebuah organisasi politik yang terstruktur dan memobilisasi kelas pekerja demi menuju ke tatanan yang baru.<sup>82</sup>

### **1.7.2.3. Historical Bloc**

Gramsci memakai istilah blok historis sebagai suatu kesatuan dari berbagai unsur ideologis yang berbeda kepada suatu konsepsi yang saling mendukung berdasarkan nilai-nilai sosialis demi kepentingan kelas pekerja.<sup>83</sup> Dalam hal ini, Gramsci menekankan kepada peran aktif dari partai politik sebagai organisatoris sebuah perubahan. Partai politik dianggap Gramsci sebagai barisan depan dalam menciptakan hegemoni baru, tetapi partai politik tidak bisa ditetapkan sebagai pemegang tunggal kebenaran ilmiah.<sup>84</sup> Gagasan mengenai tatanan yang sosialis harus melalui konektivitas secara menyeluruh terhadap setiap elemen-elemen yang ada dalam masyarakat. Jadi, Gramsci memberikan porsi lebih kepada partai politik dalam mengkonsolidasi setiap kepentingan-kepentingan demi terbentuknya sebuah blok historis baru.

---

<sup>82</sup> Stephen Gill, *Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method* (New York: Cambridge University Press), 65.

<sup>83</sup> Roger Simon, 89.

<sup>84</sup> Ibid, 163.

Pandangan Gramsci diperkuat oleh analisa Cox yang menyatakan blok historis sebagai kekuatan sosial politik yang komprehensif meliputi dimensi politik, etnik dan ideologi terhadap pola ekonomi.<sup>85</sup> Blok historis dikatakan berjalan dengan baik apabila terjadi konektivitas antara masyarakat sipil (*civil society*) dengan masyarakat politik (*political society*).<sup>86</sup> Masyarakat sipil mengacu kepada komunitas atau organisasi seperti serikat perdagangan, partai politik, organisasi keagamaan, asosiasi kebudayaan dan juga komunitas jurnalis.<sup>87</sup> Dalam masyarakat sipil ini terjadi sebuah pola hubungan yang kompleks dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam konteks praktek-praktek sosial. Sedangkan masyarakat politik merupakan keberadaan lembaga-lembaga negara seperti administrasi negara, polisi serta badan hukum negara.<sup>88</sup> Masyarakat politik tidak berada sebagai pengganti istilah negara, tetapi masyarakat politik mengacu kepada pola interaksi koersif yang terjadi pada aparatur negara.

Dalam konteks internasional, Cox menitikberatkan kepada keberadaan negara-negara dalam membangun kekuatan blok historis. Tugas untuk melakukan perubahan tatanan dunia dimulai dengan membangun blok historis baru pada batasan nasional (*national boundaries*).<sup>89</sup> Dengan kata lain, blok historis tersusun atas kesepahaman ide-ide antar negara guna melakukan transformasi terhadap sistem yang menghegemoni dunia.

#### ***1.7.2.4. War of Position***

---

<sup>85</sup> Robert Cox, *Governance without Government: Order and Change in World Politics*, ed. James N. Rosenau and Ernst Otto Czempiel (Cambridge: Cambridge University Press, 1992), 141.

<sup>86</sup> Robert Cox and Timothy J. Sinclair, *Approaches to World Order*, 112.

<sup>87</sup> Ibid, 102.

<sup>88</sup> Ibid, 104.

<sup>89</sup> Stephen Gill, 65.

Blok historis yang telah memiliki kesepahaman ideologis pada dasarnya harus memiliki langkah taktis berupa strategi dalam melakukan perlawanan terhadap hegemon (*counter hegemony*). Gramsci mengklasifikasikan ada dua cara yang bisa dilakukan dalam upaya merealisasikan hegemoni baru yaitu perang gerakan (*war of maneuver*) dan perang posisi (*war of position*).<sup>90</sup> Perang gerakan sejatinya merujuk kepada strategi dalam marxisme ortodoks sebagai upaya revolusi. Strategi ini sepenuhnya bertopang kepada cara-cara koersif berupa kekerasan yang dilakukan oleh partai revolusioner. Secara khusus, Gramsci menyatakan perang gerakan akan efektif apabila dilakukan di negara yang masih terbelakang. Dalam pola negara yang masih terbelakang, negara adalah segalanya dan masyarakat sipil tidak memiliki porsi dalam perjalanan negara sehingga tidak memiliki pengaruh. Pada masyarakat yang kapitalistik, hubungan antara negara dan masyarakat sipil terjadi secara layak yang artinya strategi perang gerakan tidak relevan untuk dilakukan.<sup>91</sup>

Strategi perang posisi menjadi lebih cocok bagi Gramsci dalam upaya *counter hegemony* terhadap sistem kapitalis. Gramsci menyatakan perang posisi sebagai usaha dalam menyebarkan ideologi, norma, mitos, politik dan kebudayaan kelompok berkuasa. Strategi ini tidak melakukan penyerangan secara fisik.<sup>92</sup> Dengan pemahaman lain, perang posisi adalah proses transformasi kultural untuk menghancurkan suatu hegemoni dan menggantinya dengan hegemoni baru. Proses ini melalui serangkaian langkah untuk menguniversalkan gagasan kelompok organik tersebut.<sup>93</sup>

Dalam skema internasional, negara-negara adalah aktor signifikan dalam melanggengkan arus globalisasi. Sesuai dengan gagasan Gramsci, Cox menyatakan bahwa

---

<sup>90</sup> Muhadi Sugiono, 45.

<sup>91</sup> Ibid, 46.

<sup>92</sup> Ibid, 46.

<sup>93</sup> Ibid, 47.

kekuatan-kekuatan sosial dalam konteks hubungan antarnegara yang kontra-hegemoni harus berada pada perang posisi.<sup>94</sup> Cox menambahkan, gerakan buruh harus dimobilisasi dan terkonsolidasi secara global dalam rangka melenyapkan jarum-jarum kapitalisme. Globalisasi dari ‘atas’ harus dilawan dengan globalisasi dari ‘bawah’.<sup>95</sup> Jadi, perang posisi harus dilaksanakan dalam skema global agar tatanan dunia yang baru dapat terwujud.

## 1.8. Metodologi

### 1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini secara garis besar memakai metode kualitatif sebagai cara untuk menjelaskan data-data yang didapat berupa tulisan ilmiah dan pemaparan laporan serta tindakan yang tergambar di dalam hasil penelitian.<sup>96</sup> Dalam penelitian ini, Tipe penelitian yang dipakai adalah tipe representasi sejarah (*historical representation*), yang mengacu kepada data berupa fakta-fakta sejarah. Temuan data berupa kepingan-kepingan yang terpisah tersebut akan dirunut berdasarkan waktu, sehingga menjadi pengetahuan (*knowledge*) yang sesuai dengan fenomena yang terjadi di masa lampau. Beberapa langkah yang dilakukan dalam metode penelitian ini adalah:

1. Mengkonseptualisasikan objek penelitian.
2. Menemukan bukti sejarah.
3. Mengevaluasi kualitas dari bukti sejarah.
4. Menyusun bukti sejarah yang ditemukan.
5. Mensintesisikan hasil temuan data.

---

<sup>94</sup> Martin Griffiths, 161.

<sup>95</sup> Ibid, 162.

<sup>96</sup> Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)* (Jakarta: Gaung Persamda Press, 2008), 186.



## 6. Menulis laporan.<sup>97</sup>

### 1.8.2. Batasan Penelitian

Batasan masalah suatu penelitian sangat penting untuk difokuskan, agar pembahasan dalam suatu objek penelitian tidak melebar kemana-mana. Tulisan ini akan fokus kepada upaya PKI dalam melakukan *counter hegemony* terhadap kapitalisme di Indonesia. Di sisi lain, peneliti memberikan batasan waktu mulai dari tahun 1955 sampai tahun 1965. Tahun 1955 dipilih sebagai batasan awal mengacu kepada kesuksesan PKI dalam pemilu dengan menempati urutan keempat sebagai bukti bahwa PKI mulai menjadi partai politik yang berpengaruh.<sup>98</sup> Tahun 1965 diambil sebagai batasan akhir merujuk kepada peristiwa G30S yang menandai kehancuran PKI dalam dinamika politik Indonesia.<sup>99</sup> Batasan ini diambil melihat dinamika PKI yang cukup dominan dalam kurun waktu tersebut. Selain itu, ideologi komunisme yang diusung PKI diakui sebagai ideologi yang terkoneksi secara internasional yang dinaungi oleh organisasi *Comintern*. Akan tetapi, peneliti tertarik untuk membatasi pola hubungan PKI dalam *Comintern* dengan dua partai komunis yang ada di negara lain, yaitu dengan PKUS dan PKC. Hal ini dikarenakan dua negara komunisme ini yang telah berhasil mewujudkan revolusi sosialis di masing-masing negara. Selain itu, secara berturut-turut, Uni Soviet adalah negara dengan jumlah anggota komunis terbesar pertama di dunia, setelah itu diikuti oleh Cina dan Indonesia menjadi negara terbesar ketiga dalam populasi jumlah anggota berhaluan komunisme.<sup>100</sup>

### 1.8.3. Unit dan Level Analisis

---

<sup>97</sup> W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Boston: Allyn and Bacon, 1997), 381.

<sup>98</sup> Peter Kasenda, 103.

<sup>99</sup> Ibid, 209.

<sup>100</sup> Imam Yudotomo, 21.

Unit analisis dipahami sebagai perilaku objek yang menjadi landasan keberlakuan pengetahuan yang digunakan.<sup>101</sup> Dalam penelitian ini unit analisis yang digunakan adalah kelompok yaitu PKI. Selain itu level analisis bertindak sebagai landasan terhadap keberlakuan pengetahuan yang digunakan.<sup>102</sup> Oleh karena itu, sistem internasional berposisi sebagai level analisis karena mengacu kepada pendekatan Neo-Gramscian yang menyatakan tatanan dunia adalah sesuatu yang holistik (*world order*). Sedangkan unit eksplanasi dari penelitian ini adalah upaya *counter hegemony* terhadap kapitalisme di Indonesia.

#### 1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang dilakukan yaitu melakukan pencarian, penelurusan dan pengumpulan sumber-sumber yang relevan dan berhubungan dengan penelitian.<sup>103</sup> Data-data yang ada peneliti kumpulkan dari penulisan skripsi terdahulu yang juga melalui metode-metode penulisan ilmiah. Di sisi lain, jurnal-jurnal yang ada, baik itu tulisan yang dikeluarkan oleh aktor yang aktif di PKI sendiri maupun tulisan-tulisan dari peneliti PKI lainnya. Selain itu, tulisan-tulisan berupa buku-buku teks, dokumen resmi, arsip, catatan sejarah, otobiografi dan analisa yang dilakukan oleh ahli lain yang dipublikasikan dan dikumpulkan melalui serangkaian kegiatan observasi.<sup>104</sup> Berkaitan dengan pembahasan tentang komunisme di Indonesia juga akan sangat mendukung dalam proses pengumpulan data. Oleh karena itu, secara langsung dapat

---

<sup>101</sup> Joshua S. Golstein, John C. Pavehouse, *Level of Analysis*. (London: Pearson International Edition, 2007), 17.

<sup>102</sup> Ibid, 17.

<sup>103</sup> Lawrence W. Neumann, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach* (Boston: Allyn and Bacon, 1997), 70.

<sup>104</sup> Catherine Marshall and Gretchen B. Rossman, *Designing Qualitative Research* (New York: New York Press, 2003), 116.

dikatakan penelitian ini menggunakan sumber sekunder sebagai sumber data (*literature research*).

### **1.8.5. Teknik Pengolahan Data**

Dalam meneliti sejarah adalah sesuatu yang sangat penting dalam menginterpretasi kejadian-kejadian yang berhubungan dengan aktor secara runut. Kumpulan informasi yang masih acak selanjutnya akan disusun menjadi suatu rangkaian deskripsi (*description*) yang diperoleh melalui penafsiran (*interpretation*) atas sejumlah informasi yang ada.

Pengolahan data dilakukan mengacu kepada konsep yang dipaparkan oleh Robert Cox dan Antonio Gramsci. Pertama, data yang didapat disesuaikan dengan konsep tatanan sistem kapitalis yang hegemonik menurut Cox, hingga masuk kepada tatanan sistem domestik negara (Indonesia) menurut konsep Hegemoni yang dipaparkan oleh Gramsci.

Agenda-agenda menyangkut dengan *counter hegemony* dimulai dengan menginput konsep Gramsci tentang *organic intellectuals* dan disempurnakan oleh Cox dengan gagasan organisasi politik dalam dinamika PKI sebagai kelompok partai yang mengusahakan perlawanan terhadap sistem kapitalisme yang dominan. Selanjutnya, data yang didapat akan dielaborasi lebih lanjut dengan konsep *historical bloc* dalam konteks negara (Gramsci) dan sistem internasional (Cox). Setelah itu, penelitian akan disempurnakan dengan operasionalisasi konsep *war of position* sebagai langkah-langkah yang diambil PKI dalam melakukan *counter hegemony* terhadap kapitalisme di Indonesia.

## **1.9. Sistematika Penulisan**

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memaparkan tentang latar belakang penelitian serta masalah apa yang menarik untuk dibahas. Dalam bab ini, penulis juga berusaha untuk memberikan penjelasan tentang

urgensi membahas permasalahan PKI melihat dari konteks hubungan serta tatanan internasional dan permasalahan yang hingga saat ini masih ada. Bab ini juga berisi kerangka konseptual yang bisa menjelaskan aspek esensial PKI itu sendiri dan metode penelitian.

## Bab II : Hegemoni Kapitalisme di Indonesia

Dalam bab ini, penulis berusaha untuk memberikan gambaran tentang hegemoni kapitalisme di Indonesia berangkat dari tatanan dunia yang juga cenderung kapitalistik penulis juga berupaya untuk mendeskripsikan hegemoni kapitalisme yang dibawa oleh kolonial Belanda dan Amerika Serikat.

## Bab III : PKI sebagai Partai Politik yang Mengusahakan Revolusi Sosialis di Indonesia

Bab ini akan berisi pemaparan tentang dinamika PKI itu sendiri yang memiliki banyak tujuan mulai dari menguasai pemerintahan domestik negara, melawan kapitalisme hingga merealisasikan revolusi sosial di Indonesia.

## Bab IV : Upaya PKI dalam Melakukan *Counter Hegemony* terhadap Kapitalisme di Indonesia (1955-1965)

Bab ini mencoba untuk mengoperasionalisasikan kerangka konseptual yang digagas Gramsci dan Cox dalam isu yang dibahas, mulai dari tatanan kapitalisme yang menghegemoni level global sampai domestik negara, hingga upaya-upaya PKI dalam melakukan *Counter Hegemony* di Indonesia merujuk kepada langkah dan strategi yang dipaparkan oleh Gramsci dan Cox.

## Bab V : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berusaha untuk memberikan kesimpulan serta saran, berangkat dari sejarah PKI yang dirunut secara historis, serta langkah apa saja yang cocok untuk dilakukan hari ini menyangkut fakta sejarah PKI dan sistem kapitalisme yang makin kuat kedudukannya.

